

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perjalanan suatu bangsa. Hampir semua negara yang ada di dunia ini menerapkan suatu aturan maupun skema tentang pengenaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung tak terkecuali di Indonesia ini. Sejarah mengenai pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonial sampai dengan sekarang. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan antar daerah dan pembangunan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan kemampuan daerah tersebut. Keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat.

Kebijakan yang dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya masing-masing dengan harapan setiap daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Pelaksanaan Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan,

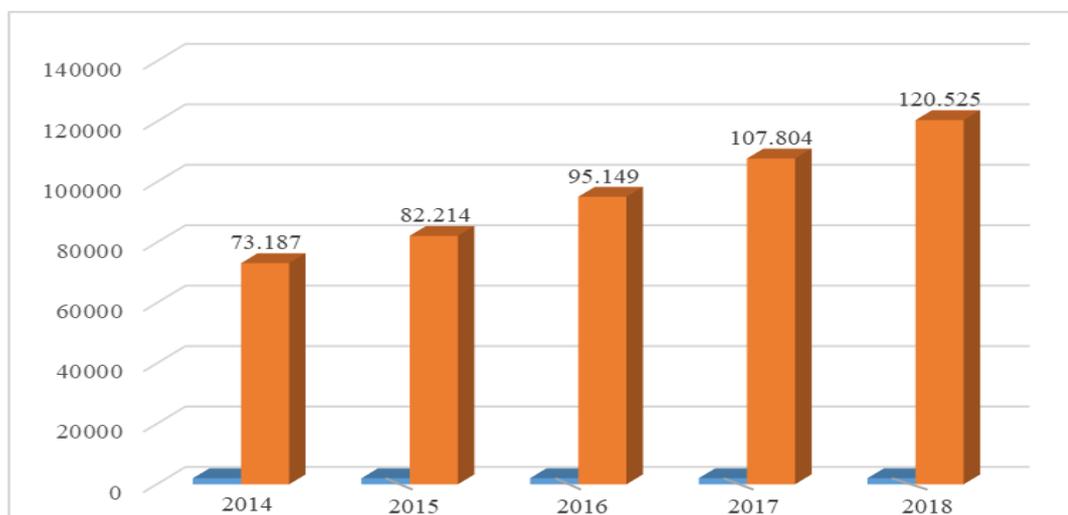
pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing-masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pajak merupakan salah satu sektor terbesar yang menambah penghasilan sumber pendapatan negara maupun daerah pada saat ini. Pajak merupakan kontribusi wajib wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ditinjau dari segi lembaga pemungutan dan pengelolaan pajak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu pajak pusat (pemerintah) dan pajak daerah. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
4. Lain-lain PAD

Kota Tasikmalaya, merupakan sebuah kota di Priangan Timur yang terbentuk setelah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tahun 2001 silam. Walaupun menyandang status kota yang masih tergolong baru di Jawa Barat namun mempunyai cita-cita menjadi salah satu daerah termaju setidaknya di wilayah Priangan Timur. Berbagai pencapaian telah di raih pada tiap tahunnya, seperti infrastruktur yang lebih merata, tumbuhnya pusat perbelanjaan baik tradisional maupun modern, adanya bandara, lahirnya perguruan tinggi negeri, tumbuhnya destinasi wisata dan lain sebagainya. Hal ini mampu menjadikan Kota Tasikmalaya menjadi salah satu magnet ekonomi bagi daerah lain di Jawa Barat. Salah satu upaya pemerintah Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan PAD adalah melalui pemungutan pajak daerah. Untuk mengetahui kondisi secara umum Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2018 (Juta)

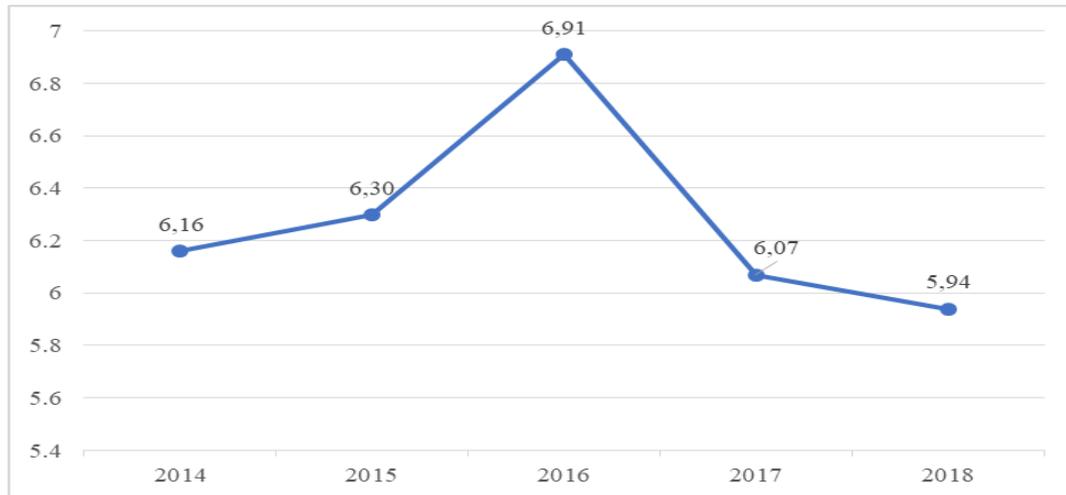
Sumber: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2018, Buku Saku Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tasikmalaya, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan gambar 1.1 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak di Kota Tasikmalaya setiap tahun mengalami kenaikan dilihat mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018. Pada tahun 2014 penerimaan pajak Kota Tasikmalaya sebesar Rp.73.187 juta dan pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp.83.214 juta kemudian pada tahun 2016 menjadi Rp. 95.149 juta terus meningkat di tahun 2017 menjadi Rp. 107.804 juta kemudian diikuti oleh tahun 2018 menjadi Rp.120.525 juta. Dari 2015 sampai 2017 pencapaian pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah cenderung stabil, pencapaian target setiap tahun selalu memenuhi target bahkan lebih dari target yang ditetapkan dengan kenaikan pada kisaran 1–12% lebih. Hal ini dikarenakan masih banyaknya potensi pajak daerah yang belum tergali secara optimal. Oleh karena itu untuk kedepannya perlu adanya optimalisasi pajak daerah melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

Penerimaan pajak suatu daerah tidak lepas dari beberapa faktor diantaranya Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi. Faktor-faktor ini selalu berfluktuasi setiap tahunnya dan dapat digunakan sebagai proyeksi penerimaan pajak daerah.

Salah satu indikator yang penting untuk diketahui pada suatu wilayah adalah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Indikator ini memperlihatkan bagaimana perekonomian suatu wilayah tumbuh membesar dari sisi volume barang dan jasa yang di hasilkan. Laju pertumbuhan ekonomi juga dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Untuk mengetahui kondisi Laju

Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Gambar 1.2.



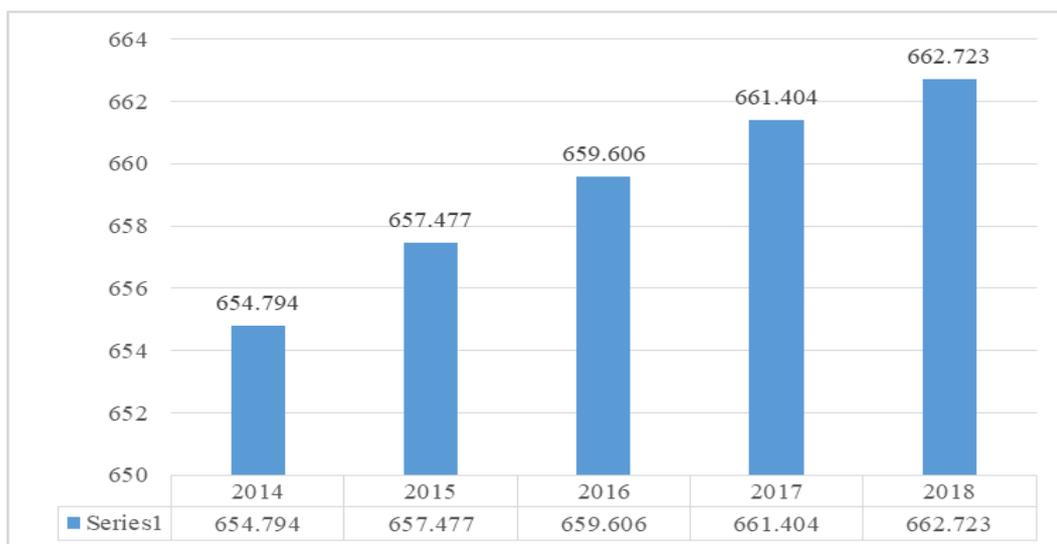
Gambar 1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2018 (Persen)

Sumber: Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tasikmalaya Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, BPS Kota Tasikmalaya.

Dari gambar 1.2 dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya setiap tahunnya mengalami fluktuasi pada tahun 2014 LPE kota tasikmalaya sebesar 6,16% kemudian pada tahun 2015 menjadi 6,03% dan LPE tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,91% sedangkan pada tahun 2017 tingkat LPE sebesar 6,07% dan pada tahun 2018 menjadi 5,94%. terjadi penurunan yang signifikan yaitu tahun 2017 yaitu sebesar 6,07% angka ini mengalami perlambatan bila dibandingkan dengan tahun sebelum-nya, tetapi masih jauh diatas LPE Jawa Barat dan Nasional. Selama kurun waktu lima tahun terakhir struktur ekonomi Kota Tasikmalaya didominasi oleh lima kategori lapangan usaha diantaranya perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 22,65%, Kontruksi 15,90%, Industri Pengolahan

13,78%, Jasa Keuangan dan asuransi 10,95%, serta Transportasi dan Pergudangan 9,63%. Hal ini terlihat dari besarnya andil lapangan usaha tersebut terhadap nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Selain Laju Pertumbuhan Ekonomi yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan akhirnya mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah, terdapat juga beberapa faktor lain yang mencerminkan keberhasilan pembangunan suatu daerah yaitu jumlah penduduk. Untuk melihat kondisi jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar 1.3.



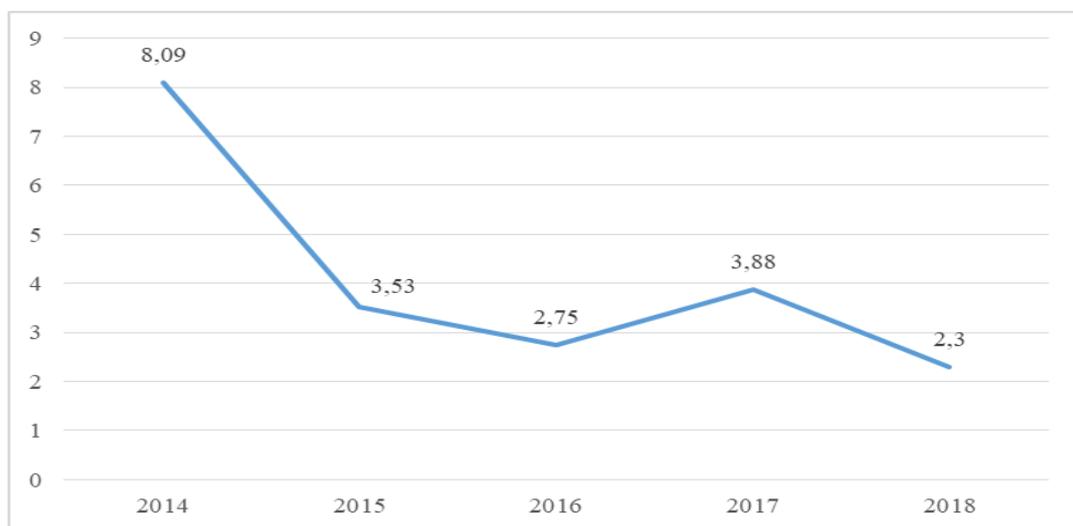
Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2018 (Orang)

Sumber: Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya 2003-2018, BPS Kota Tasikmalaya.

Pada gambar 1.3 dapat diketahui bahwa semenjak tahun 2014 sampai 2018 perkembangan jumlah penduduk Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan. Jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 654.794 orang kemudian pada tahun 2015 sebanyak 657.477 orang, sementara pada tahun 2016 sebanyak 659.606 orang.

Sedangkan pada tahun 2017 jumlah penduduk Kota Tasikmalaya sebanyak 661.404 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 662.723 orang.

Salah satu indikator yang digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu wilayah adalah inflasi. Inflasi ataupun Deplesi merupakan presentase tingkat perubahan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh rumah tangga. Untuk melihat perkembangan tingkat Inflasi di Kota Tasikmalaya 2014-2018 disajikan dalam Gambar 1.4.



Gambar 1.4 Tingkat Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2014-2018 (Persen)

Sumber: Tabel Inflasi Kota Tasikmalaya 2003-2018, BPS Kota Tasikmalaya

Pada tahun 2014 laju inflasi Kota Tasikmalaya naik di angka 8,09% yang dipicu oleh kenaikan Bahan bakar Minyak (BBM). Adapun untuk Tahun 2015 angka inflasi mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 3,53% capaian ini salah satunya oleh penurunan harga BBM pada awal tahun 2015 yang berdampak pada menurunnya harga barang dan jasa dikarenakan biaya transportasi orang dan barang menjadi lebih murah. Inflasi Kota Tasikmalaya tahun 2016 berada pada

angka 2,75%, angka ini merupakan angka terendah selama kurun waktu 12 tahun terakhir. Angka inflasi sebelumnya berada pada angka 3,53%. Rendahnya inflasi merupakan bentuk keberhasilan pemerintah daerah dan tim pengendali inflasi daerah (TPID). Inflasi pada tahun 2017 sebesar 3,88%. Komoditas penyumbang inflasi tertinggi selama tahun 2017 di Kota Tasikmalaya adalah tarif listrik, yaitu sebesar 1,04%.

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap penerimaan pajak daerah kota Tasikmalaya dengan judul **“Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2006-2018”**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tasikmalaya.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi secara parsial, terhadap penerima pajak daerah di Kota Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tasikmalaya.

1.4. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam ekonomi Pembangunan khususnya materi atau pembahasan tentang Penerimaan Pajak Daerah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah penduduk dan Inflasi.

2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan berfikir dan pengetahuan baik teori maupun aplikasi, dimana secara teori lebih memperdalam pemahaman ilmu yang diperoleh pada saat perkuliahan dan aplikasinya diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang “Pengaruh Laju Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Tasikmalaya” sehingga dapat membandingkan antara teori yang penulis dapatkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

- b. Bagi Lembaga

Dapat dijadikan sumber informasi dalam menunjang perkuliahan. Diharapkan dapat menambah pembendaharaan

perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap penelitian yang serupa.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan alat oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan Penerimaan pajak, dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat memberikan manfaat untuk dijadikan bahan dan perbandingan dan petunjuk untuk keperluan penelitian pada masalah yang serupa dan penelitian lanjutan dan juga sebagai masukan bagi pihak lain yang membutuhkan.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat Republik Indonesia.

